

KONFLIK ELIT POLITIK DI KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM TAHUN 1803-1821

Oleh:

Ravico

*Dosen Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan PGRI
Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia*

Abstrak

Effected by the conflict which is very crucial in the Sultanate of Palembang Darussalam good political conflicts between the family of the sultan as well as fellow of the colonial never done since the year 1803 to Sultanate of Palembang Darussalam experienced the fall of the year 1821. In this research historical methods with its procedure used in. This study is a research library (library research) by using the methods of descriptive analysis. From the results of the analysis note that the political elite divided the ruling political elite and non-elite to rule. The ruling political elite was the sultan and the priyayi. They have a role regulating stability in society and create policies. While the non-ruling political elite is United Kingdom and Netherlands colonial. The colonial was originally cast as traders who try to monopolize trade and then intervened in the Affairs of Government. The next conflict interen between Sultan Mahmud Badaruddin II to Sultan Ahmad Najamuddin II was the Sultan Mahmud Badaruddin II disappointment with treason committed by his brother Sultan Ahmad Najamuddin II, the internal conflicts of colonial so stimulated by internal conflicts are increasingly complex. While the conflict with the Sultanate of Palembang Darussalam differences caused by the colonial

interests. Sultanate of Palembang are trying to break away from colonial and gaining sovereignty.

Key Words: *-conflicts, -the political elite, -sultanate and colonial*

A. Pendahuluan

Kesultanan Palembang mendapat banyak julukan atas keberhasilan pembangunan politik, ekonomi, dan sosialnya. Bagaikan pusat perdagangan di Eropa yaitu Venesia, maka Palembang mendapat julukkan *net indische Venetie*. Bahkan nama *darussalam* diterjemahkan *de stad des vredes* yang berarti tempat yang tentram. Gambaran ini dikemukakan oleh Mayor M.H Court yang dikutip oleh Djohan Hanafiah (1996: 48-49):

“Dari seluruh pelabuhan di wilayah orang-orang Melayu, Palembang telah membuktikan dan terus secara seksama menjadi pelabuhan yang paling aman dan dengan peraturan yang paling baik, seperti dinyatakan oleh orang-orang pribumi dan orang-orang Eropa. Begitu memasuki perairan sungai, perahu-perahu kecil dengan kewaspadaan yang biasa dan tindakan-tindakan pencegahan yang akan mengamankan dari kekerasan dan perampasan. Di bagian luar sungai perahu-perahu kecil perampok setiap saat bersembunyi di dalam *suak* (anak-anak sungai kecil) dan terlindung di bawah hutan sepanjang pantai akan memangsa perahu-perahu dagang kecil yang memasuki sungai, tetapi hal ini jarang terjadi karena dijaga oleh kekuatan sultan dengan segala peralatan.”

Keberhasilan inilah yang pada akhirnya mengantarkan Kesultanan Palembang Darussalam pada berbagai konflik baik konflik interen maupun konflik eksteren. Dalam kasus aristokrasi Kesultanan Palembang Darussalam hal ini tidak dapat dibantahkan.

Keberhasilan Sultan Muhammad Bahauddin membangun perekonomian di Palembang menimbulkan konflik dari para elit dan para bangsawan berupaya memperebutkan posisi Kesultanan Palembang Darussalam.

Ketika Kesultanan Palembang Darussalam dipimpin Sultan Mahmud Badaruddin II, selalu disibukkan oleh konflik para elit politik. Upaya para elit untuk memperoleh kedudukan dan memperebutkan posisi dan kekuasaan atas wilayah kesultanan dilakukan dengan berbagai cara. Kondisi ini sering menimbulkan konflik kepentingan dan persaingan kekuasaan antara raja dan priyayi (elit). Meskipun kehidupan keraton menjamin kehidupan enak dan beradab, namun elit ini sering bermain politik (Hanafiah,1995:173) dalam hal ini peran antara elit di dunia politik yang menghalalkan segala cara dan saling menjatuhkan serta memojokan elit lain yang dianggap musuh sehingga menimbulkan bencana di keraton.

Masa Sultan Mahmud Badaruddin II, konflik elit politik ini, memang tidak pernah kunjung selesai hingga jatuhnya kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan elit politik Belanda. Dalam catatan sejarah, pengkhianatan para bangsawan (elit) seperti pengkhianatan oleh saudara kandung Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu Husin Diauddin, ia bersekutu dengan elit politik Belanda untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II. Belanda menjanjikan kedudukan anaknya Prabu Anom sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin IV. Sedangkan Ia menjadi Susuhunan (Hanafiah,1986:17).

Tidak hanya itu, sebelumnya telah terjadi konflik antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan elit politik Inggris. Dalam konflik ini Sultan Mahmud Badaruddin II dituduh terlibat dalam pembunuhan

masal di Loji Sungai Aur. Sebagai penengah Pangeran Adipati menjadi juru bicara kesultanan dan Sultan Mahmud Badaruddin II mengasingkan diri ke Musi Rawas. Kondisinya menjadi terbalik ketika Pangeran Adipati melakukan pengkhianatan, Ia memperoleh kedudukan sebagai sultan penguasa Kesultanan Palembang Darussalam dengan gelar Ahmad Najamuddin (Hanafiah,1989: 65).

Kesetiaan para elit politik Kesultanan Palembang Darussalam mengalami gelombang pasang surut. Kehidupan yang serba cukup dan mewah tidak membuat para bangsawan (elit) ini merasa cukup dengan kedudukannya (Hanafiah,1995:173). Berbagai cara untuk memperoleh kedudukan yang dicita-citakan. Bahkan tanpa memandang ikatan keluarga para elit ini terus bersaing dan saling menjatuhkan. Sering kali konflik ini muncul kepermukaan dan menimbulkan gerakan bawah tanah untuk menjatuhkan kedudukan yang sah.

Konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam menjadi sangat komplek dan krusial ketika para elit pedagang asing seperti Belanda dan Inggris ikut campur serta memberikan pengaruh politiknya di Kesultanan Palembang Darussalam. Persaingan di antara bangsa-bangsa Barat dalam perdagangan rempah-rempah dan timah yang berasal dari Palembang sering membangkitkan api peperangan. Pada umumnya latar belakang perselisihan ialah untuk memperoleh hak monopoli (PemProv,1986:28).

Kehadiran kolonial Belanda dan Inggris sebagai pedagang, melahirkan elit baru di masyarakat dan menjadi elit tandingan (*the ruling elite*) bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Akibatnya keseimbangan masyarakat pun terganggu dan menyebabkan

semakin tersisinya kelompok-kelompok elit yang ada dalam masyarakat (Varma,1987:205-203).

Kolonial Belanda dan Inggris sebagai elit baru, telah mendukung kebenaran teori elit yang dikemukakan oleh Pareto bahwa masyarakat terdiri dari 2 kelas: *pertama*, lapisan atas yaitu elit yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*). *Kedua*, lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. (Varma,1987:202). Sebagai elit baru kolonial Inggris dan Belanda berkedudukan sebagai elit yang tak memerintah.

Adanya elit baru di Kesultanan Palembang Darussalam turut melahirkan pertentangan antar elit. Pertentangan kelompok (elit) didasarkan atas dikhotomi pembagian wewenang dalam perserikatan yang dikoordinasi secara memaksa dapat ditaruh sebagai asumsi dasar. Asumsi ini ditambahkan sebuah proposisi bahwa posisi yang dilengkapi dengan wewenang yang berbeda dalam perserikatan menyebabkan pertentangan kepentingan orang yang memegangnya. Pemegang posisi dominan dan pemegang posisi yang ditundukkan, berdasarkan posisinya itu mempunyai kepentingan tertentu yang berlawanan substansi dan pelaksanaannya (Dahrendorf,1986:212).

Pertentangan antara elit penguasa Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial (Belanda dan Inggris) telah terjadi di awal pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam. Wewenang yang berbeda dalam perserikatan menyebabkan pertentangan kepentingan yang memegangnya. Kesultanan Palembang Darussalam sebagai pemegang wewenang dominan memiliki kepentingan terhadap wilayah-wilayah yang dimilikinya. Sedangkan

kepentingan berbeda dengan kolonial yang memiliki kepentingan memonopoli perdagangan di wilayah kesultanan.

Konflik elit politik memang tidak dapat dihindarkan selama sistem politik masih berjalan. Perebutan kekuasaan, prestise dan kehendak memonopoli perdagangan yang menimbulkan konflik elit politik bukanlah alibi dasar bagi munculnya konflik. Sangat tidak berimbang jika hanya untuk memperoleh kekuasaan, prestise dan menguasai monopoli harus mengorbankan putusanya ikatan kekerabatan serta hilangnya nyawa rakyat yang tidak terlibat dalam konflik para elit tersebut. Menurut penulis pasti ada nilai strategis yang menimbulkan adanya konflik. Asumsi awal penulis, nilai strategis itu terkait dalam hal perekonomian dalam kaitan kajian politik. Oleh karena itu, perlunya pengkajian yang mendalam mengenai nilai strategis yang menjadi penyebab timbulnya konflik di kalangan elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial.

Dari uraian di atas yang menjadi masalah pokok penelitian adalah bagaimana konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam 1803-1821. Untuk kepentingan analisis, maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut. Bagaimana peran elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam? Bagaimana konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam? Bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat eskalasi konflik politik Kesultanan Palembang Darussalam?

Bertolak dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam, konflik elit politik di Kesultanan Palembang

Darussalam dan untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat eskalasi konflik politik Kesultanan Palembang Darussalam.

Umumnya penggunaan penelitian untuk dua kepentingan yaitu untuk pengembangan ilmu dan *problem solving*, maka kegunaan penelitian, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi sejarah mengenai konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam serta memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi masyarakat Palembang, khususnya mengenai sejarah lokal dalam peperangan melawan kolonial Belanda dan Inggris. Selain itu, menambah khazanah ilmu pengetahuan sejarah lokal mengenai Kesultanan Palembang Darussalam. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan penjelasan mengenai elit politik dalam perannya di Kesultanan Palembang Darussalam, serta upaya-upaya atau strategi mereka dalam memperebutkan kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam. Memberikan uraian mengenai situasi dan kondisi politik Kesultanan Palembang Darussalam dan konflik elit politiknya dalam upaya untuk memerebutkan tahta atau kekuasaan, dan memberikan Informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi akibat konflik elit politik Kesultanan Palembang Darussalam.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *historis* (sejarah) yang berupaya menyelidiki konflik elit politik di Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1803-1821 dengan teknik dekriftif-analisis. Dalam hal ini penulis mendeskritifkan peristiwa-peristiwa konflik elit politik kemudian dianalisis dengan berbagai ilmu bantu lainnya untuk merekontruksi ulang peristiwa-peristiwa

konflik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis dan ekonomi-politik.

Dilihat dari jenis dan tema penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan laboratoriumnya adalah perpustakaan, maka alat heuristiknya adalah katalog-katalog. Adapun teknik pengumpulan data dengan kegiatan membaca, mencatat sumber data, dan mengkategorikan data berdasarkan sub-sub pembahasan. Setelah data telah dikumpulkan maka data tersebut di verifikasi (kritik terhadap sumber). Kritik terhadap sumber data dilakukan dengan kritik interen dan eksteren. Langkah selanjutnya menginterpretasi data menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Abdurahman (2012:114) menjelaskan bahwa keduanya analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Analisis itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam satu interpretasi yang menyeluruh.

Langkah selanjutnya yaitu historiografi, historiografi adalah langkah final dari rangkaian penelitian yang dilakukan. Sebagai tahap akhir, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin dalam bentuk sejarah sebagai sebuah peristiwa yang dituangkan. Dalam penulisan ini disusun berdasarkan kronologi atau peristiwa dan sebab akibat. Historiografi menjadi sarana mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (verifikasi) dan diinterpretasi. Rekonstruksi sejarah akan menjadi eksis apabila hasil-hasil pendirian tersebut ditulis (Daliman, 2012:99).

Karangka Teori

Dalam penelitian sejarah teori biasa dinamakan “karangka refrensi” atau “skema pemikiran”. Dalam penelitian yang lebih luas merupakan suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam penelitiannya, menyusun bahan-bahan (data) yang diperoleh dari analisis sumber dan juga mengevaluasi hasil penemuan (Abdurahman, 2012: 29). Selanjutnya pemaknaan konflik sendiri berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan (Poerwordaminto, 2000: 461). Menurut Webster, istilah “*Conflict*” di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep. Dengan demikian konflik diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004: 9).

Umumnya konflik (Nasikun, 1995: 21) dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang segala dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan

meramalkan gejala tersebut. Konflik ini terjadi di antara kelompok-kelompok dengan tujuan untuk memperebutkan hal-hal yang sama. Dengan demikian konflik adalah merupakan gambaran dari sebuah permainan, baik untuk permainan yang memenangkan kedua belah pihak (*Non-Zero Sum Conflict*) maupun yang juga mengalahkan pihak lain (*Zero- Sum Conflict*) seperti kelas konflik yang terjadi pada masyarakat industri (Dahrendorf, 1986: 210-222).

Elit politik merupakan gabungan dua kata yaitu elit dan politik. Elit secara bahasa merupakan orang yang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok (Muda, 2006: 200), sedangkan politik merupakan hal-hal yang berkenaan dengan tata negara atau urusan yang mencangkup siasat dalam pemerintahan negara atau negara lain (Muda, 2006: 425). Kemudian dapat disimpulkan bahwa elit politik adalah orang yang terbaik yang mampu mengurus dan paham mengenai tata negara.

Selanjutnya makna elit menurut Pareto yang dikutip Varma (1987: 202) merupakan orang-orang yang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Berangkat dari definisi di atas, Pareto membagi dua kelompok elit politik yaitu kelompok elit memerintah dan elit tidak memerintah. Kelompok elit memerintah adalah kelompok elit yang memiliki kekuasaan, wewenang dan kebijakan dalam mengatur masyarakat, sedangkan elit tidak memerintah merupakan kelompok elit yang tidak memiliki peran dalam pemerintahan tetapi memiliki pengaruh di masyarakat. Dari pengertian tersebut yang dimaksud elit politik dalam penelitian ini merupakan elit politik yang memerintah dan *non* memerintah. Elit pemerintah adalah kelompok Kesultanan Palembang Darussalam,

sedangkan kelompok elit tidak memerintah adalah kelompok kolonial Belanda dan Inggris.

I. ISI

a. Landasan Teori

Pilihan terhadap suatu teori yang akan digunakan untuk menggarap suatu subjek penelitian tentu tidak dengan sendirinya dapat digunakan bagi peneliti subjek yang lain. Karena itu, peneliti yang bersangkutan perlu memeriksa bahan-bahan secara seksama agar memperoleh kejelasan untuk menentukan teori yang digunakan. Sehubungan dengan itu, penelitian yang subjeknya menyangkut konflik elit politik. Maka perlu suatu pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan konflik itu. Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan (Poerwordaminto,2000:461). Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa (Nasikun,2005:21). Menurut Webster menyatakan bahwa:

“ Istilah “*Conflict*” di dalam bahasa aslinya suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Kata ini kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi itu sendiri. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep. Dengan demikian konflik di artikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Rubin,2004:19).”

Hal lain yang tampak dari sebuah konflik ialah sifat konfrotansi yang merupakan tingkah laku individu yang bermaksud untuk memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka. Pada umumnya sifat konfrotatif berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang yang disebut agresif. Artinya situasi yang dihadapi oleh individu melahirkan hambatan terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Dalam kaitannya dengan konsep konfrotansi dikembangkan teori tentang “keterelakan sejarah” atau “hal-hal yang secara historis tak terelakkan.” Teori ini dikembangkan oleh Marx berdasarkan tesis, antitesis dan sintesis. Marx berdasarkan teorinya pada konflik material dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang saling bertentangan, menurutnya:

“Ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan ketergantungan, melainkan konflik dan persaingan. Setiap masyarakat baik di masa lalu maupun di masa sekarang ditandai dengan konflik sosial yang dimaksud adalah konflik antara kelas kapitalis, kaum borjuis yang memiliki sarana-sarana produksi (majikan), dengan kelas pekerja yang *ter-ekspolitas* dan kaum proletariat yang tidak memiliki sarana-sarana produksi (Maran,2001:20).”

Teori konflik yang bertolak dari material dan ekonomi, kemudian dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk melakukan penelitian, khususnya di dalam permasalahan konflik elit politik. Sehubungan dengan pemahaman tersebut, Louis Coser yang dikutip oleh Decki Natalis Pigay Bik (2000:70) memberikan definisinya:

“Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa (kekuasaan) dan sumber-sumber kekayaan yang persediaanya tidak mencukupi/memenuhi, dimana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau melemahkan lawan mereka.”

Selain itu, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetiaan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Dari definisi dan teori yang dikemukakan di atas, terdapat dua tujuan dasar konflik yakni tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan merupakan ciri manusia yang bersifat materil-jasmaniah untuk maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat, yang ingin diperoleh manusia meliputi hal-hal yang sesuai dengan kehendak bebas dan kepentingannya. Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memperoleh sumber-sumber ekonomi yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut, yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya, tetapi juga wilayah atau daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki. Tujuan mempertahankan diri tidak menjadi monopoli manusia saja karena binatang sekalipun memiliki watak untuk berupaya mempertahankan diri. Maka dengan itu dirumuskan tujuan konflik politik sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Surbakti, 1999: 155).

Konflik elit politik terbentuk karena adanya penguasa politik. Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai penguasa politik artinya, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai konflik politik. Dalam hal ini konflik politik yang terutama adalah konflik antar penguasa politik dalam melihat objek kekuasaan politik. Konflik dapat terjadi karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat dinilai sulit didapat. Konflik dapat juga didefinisikan sebagai suatu perbedaan persepsi mengenai kepentingan bermanfaat untuk meramalkan apa yang dilakukan orang. Hal ini disebabkan persepsi yang biasanya mempunyai dampak yang bersifat segera terhadap perilaku (Jeffrey, 2004:27).

Selain pemahaman makna dan teori konflik dalam meneliti konflik elit politik, maka diperlukan juga pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan elit politik. Elit merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan). Dalam kajian ini penulis mengkatagorikan elit politik ke dalam dua kelompok yaitu, *pertama* elit politik memerintah (*governing elite*) merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan), seperti khalifah, raja, sultan, presiden, gubernur, dan lainnya. *Kedua*, elit politik tidak memerintah (*non-governing elite*) adalah seseorang yang tidak memiliki jabatan dalam kekuasaan namun menduduki posisi strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, seperti: elit keagamaan, elit pedagang, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Duverger, 1987:179).

Perbedaan tipe elit ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elit politik dalam proses perebutan kekuasaan pada

masa Kesultanan Palembang Darussalam. Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*) (Duverger, 1987:179).

Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antar kelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan *Kedua*, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada (Varma, 1987:203). Dalam sirkulasi elit yang disebutkan oleh Masco, terutama karena terjadinya “penjatuhan rezim”, konflik pasti tidak terhindarkan, karena masing-masing pihak akan menggunakan berbagai macam cara. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat digunakan seperti organisasi dan jumlah, uang

(kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya (Varma,1987:275).

b. Hasil Penelitian

1. Peran Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821

Dalam kajian ini penulis mengkatagorikan elit politik ke dalam dua kelompok yaitu, pertama elit politik memerintah (*governing elite*) dan elit politik tidak memerintah (*non-governing elite*) (Duverger,1987:179). Elit politik yang memerintah dalam penelitian ini adalah sultan, priyayi seperti pangeran, raden, adipati, pepatih, penghulu dan hakim (jaksa negara). Adapun peran mereka dalam pemerintahan yang kemudian dikenal dengan *mancanegara* meliputi:

- a. Pepatih (*rijksbestuurder*) di sini namanya Pangeran Natadiraja memiliki peranan memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota (negara) maupun di daerah hulu sungai (uluan). Ia adalah *mancanegara* yang pertama, yang menjalankan hukum adat dalam negeri Palembang serta jajahannya. Keterangan selanjutnya: ia adalah sebenarnya kepala pemerintahan kerajaan, orang yang mengusahakan pelaksanaan dari perintah-perintah raja. Di bawah pengawasannya pendapatan dari kerajaan dikumpulkan. Kepadanya semua urusan kerajaan disampaikan. Dalam perang, ia menguasai sarana-sarana untuk berperang, meskipun ia sendiri tidak ke medan perang. Ia mengusulkan pajak-pajak dan kerja-kerja wajib kepada raja, dan nasehat (pendapatnya) pun diminta oleh raja, jika mau menaikkan atau menurunkan pajak-pajak itu.

- b. Nata-agama, kepala alim ulama, yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum-hukum agama.
- c. Kyai Tumenggung Karta, yang di dalam segala hal merupakan tangan kanan dari Papatih, terutama disertai pengadilan hakim dan pembesar utama di Palembang. Ia memiliki seorang Temenggung sebagai pembantunya. Ia mengadili menurut al-Qur'an dan Hadist atau adat dan putusannya harus diperkuat oleh sultan sebelum dilaksanakan.
- d. Pangeran Citra, kepala dari *pengalasan* yaitu polisi bersenjata dari raja yang disertai tugas pelaksanaan hukuman-hukuman mati. Keterangan selanjutnya: dari segala orang yang akan ditangkap atau dibunuh, diserahkan kepada Pangeran Citra, kepala dari segala pengalasan. Adapun pengalasan adalah hulubalang sultan yang jaga kota. Pada umumnya hulubalang adalah penjabat-penjabat militer yang merupakan pengawal dari penguasa dan siap sedia untuk melakukan perintahnya kepada setiap kesempatan.

Husni Rahim (1998:69) memberikan gambaran mengenai *mancanegara* atau *pancalang lima*. Masing-masing *mancanegara* mempunyai jajaran pegawai kesultanan yang terdiri dari:

- a. Pegawai-pegawai tinggi (yang dijabat oleh priyayi-priyayi yang bergelar pangeran, raden dan kiagus); Mantri-mantri sebagai pegawai rendahan (yang diberi gelar tumenggung, rangga, demang dan ngabehi); penjabat-penjabat kehakiman; kesemuanya di bawah patih.
- b. Para hulubalang dan laskar kesultanan dengan berbagai tingkatannya. Mereka berada di bawah komando Pangeran Citra (Adipati).

- c. Penjabat-penjabat agama yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu Nata Agama, baik di ibukota Palembang maupun daerah uluan. Penjabat tersebut terdiri dari para khatib penghulu, khatib imam, khatib dan modin.
- d. Penjabat dan pegawai di bidang pelabuhan yang dikepalai oleh syahbandar.

Elit politik tidak memerintah (*non-governing elite*) adalah seseorang atau sekelompok yang tidak memiliki jabatan dalam kekuasaan namun menduduki posisi strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat, seperti: elit keagamaan, elit pedagang, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya (Duverger,1987:179). Dalam kajian ini elit politik yang tidak memerintah yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dengan elit politik yang memerintah adalah kelompok aristokrat dagang kolonial yaitu Belanda dan Inggris.

Peranan kolonial baik Belanda maupun Inggris pada awalnya merupakan kongsi dagang bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Perkembangan berikutnya kolonial dengan segala usaha menekan harga jual-beli demi mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin bagi pihaknya. Kemudian meningkatkan monopoli secara paksa, dan mulai mencampuri urusan dalam negeri kesultanan untuk akhirnya menguasai langsung kesultanan (Amin,1986:102).

2. Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821

Tahun 1812 konflik internal muncul ke permukaan ketika terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara kandung Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu Raden Husin Dhiauddin. Pengkhianatan terjadi ketika perang Kesultanan Palembang Darussalam melawan kolonial Inggris dan Raden Husin Dhiauddin menjadi panglima perang yang menjaga benteng pertahanan Pulau Borang yang saat itu merupakan benteng pertahanan terkuat. Raden Husin Dhiauddin yang bergelar Pangeran Adipati Husin Dhiauddin membiarkan Inggris masuk tanpa ada perlawanan dan tanggal 24 April 1812 Pulau Borang dapat dikuasai oleh Inggris (Mahruf,1999:5). Inggris yang dipimpin oleh Raffles mengangkat Pangeran Adipati Husin Dhiauddin sebagai Sultan Palembang dengan gelar Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II, untuk mendapatkan keinginannya menguasai Pulau Bangka dan hak monopoli atas timah (Hanafiah,1989:65).

Pengkhianatan yang dilakukan oleh Sultan Ahmad Najamuddin II sering diinterpretasikan sebagai tindakan yang buruk oleh penulis sejarah lokal, tanpa adanya interpretasi ilmiah. Jika dianalisis kembali pengkhianatan yang dilakukan oleh Sultan Ahmad Najamuddin II merupakan adanya kesempatan dan kekecewaan. Ketika Sultan Mahmud Badaruddin II meninggalkan keraton dan menyelamatkan diri ke Bailangu dan keraton dipercayakan kepada Sultan Ahmad Najamuddin II yang ketika itu ia menjabat sebagai panglima perang. Kemudian, ketika Inggris menduduki keraton, ia tidak bertemu dengan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Inggris hanya bertemu dengan Ahmad Najamuddin II (Mahruf,1999:5 dan lihat juga Hanafiah,1989:86). Karena Inggris tidak mau dianggap gagal dalam upaya menguasai kekayaan yang dimiliki kesultanan. Kemudian Inggris mengangkat

Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan baru, kesempatan ini diambil untuk menguasai dan menundukan masyarakat di wilayah Kesultanan Palembang. Di sisi lain, bagi Sultan Ahmad Najamudin II diangkatnya ia sebagai sultan oleh kolonial Inggris merupakan kesempatannya untuk menduduki tahta sultan yang selama ini ia dambakan sejak masa kanak-kanak.

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin Sultan Ahmad Najamuddin II berada di bawah bayang-bayang pemerintahan kolonial Inggris di Batavia. Akibat peristiwa tersebut, konflik internal antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II semakin memanas. Di sisi lain, terjadi dualisme kepemimpinan, Sultan Ahmad Najamuddin II yang diangkat oleh Inggris secara undang-undang menguasai wilayah kesultanan, akan tetapi secara adat dan pengakuan rakyat kedudukan Sultan Ahmad Najamuddin II tidak lain hanya sebuah boneka bagi Inggris (Junaidi,2001:79). Secara penuh rakyat kesultanan masih mengakui status Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Sultan Palembang yang sah secara adat. Akibatnya sikap saling mengkhudeta di antara kedua belah pihak yang menimbulkan perang saudara yang tak berkesudahan (Mahruf,1999:10).

Selanjutnya konflik eksteren antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial bermula ketika terjadinya peristiwa pembantaian loji Belanda di Sungai Aur. Atas peristiwa tersebut terjadilah perselisihan antara Belanda dan Inggris serta Kesultanan Palembang Darussalam. Dimana pihak Belanda menganggap peristiwa itu adalah perbuatan Inggris yang memprovokasi Kesultanan Palembang untuk menyerang Loji Belanda di Sungai Aur. Akan tetapi, Raffles mencoba mencari kambing hitam bahwa

peristiwa tersebut merupakan perbuatan Sultan Mahmud Badaruddin II yang menggerakkan masyarakat untuk menyerang Loji Belanda. Akan tetapi, alibi yang dikemukakan oleh Raffles tidak dapat diterima oleh pihak Belanda. Akhirnya Raffles terpojok dengan peristiwa Loji Belanda di Sungai Aur tersebut (Soetadji, 1996:12).

Setelah peristiwa itu, Inggris menduduki wilayah Kesultanan dengan mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan - boneka- yang sah dengan berbagai perjanjian. Lahirnya sebuah perjanjian dari strategi problem solving antara kolonial Inggris dengan Sultan Ahmad Najamuddin II, menurut penulis merupakan awal lahirnya politik "*divide et impera*" ala kolonial Inggris. Politik adu domba yang dimainkannya cukup berhasil menumbuhkan benih-benih konflik internal di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam. Kolonial Inggris, tidak terlalu memfokuskan diri terhadap perlawanan yang dikerahkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Karena cukup dengan konflik internal antara Sultan Ahmad Najamuddin II dengan Sultan Mahmud Badaruddin II, membuat langkah Sultan Mahmud Badaruddin II teralihkan. Sehingga kolonial lebih berfokus pada timah di Pulau Bangka dan Belitung yang kemudian kedua pulau tersebut diberi nama "*Duke of York Islands*" (PemProv,1986:36).

Pulau Bangka dengan segala sumber daya timah yang melimpah menjadi pemicu bagi lahirnya konflik di Kesultanan Palembang. Dari relitas di atas, sebenarnya teori konflik mempertanyakan eksistensi "kebutuhan-kebutuhan sosial". Ia lebih berkepentingan dengan berbagai kebutuhan, keinginan, dan kepentingan individu-individu serta sub-kelompok dalam perjuangan mereka memperoleh barang dan jasa yang bernilai dan langka (Poloma,2003:146).

Teori konflik berdasarkan pada ekonomi, telah dikembangkan oleh Marx yang didasarkan tesis, antitesis dan sintesis, menurutnya:

“Ciri utama masyarakat bukannya stabilitas dan ketergantungan, melainkan konflik dan persaingan. Setiap masyarakat baik di masa lalu maupun di masa sekarang ditandai dengan konflik sosial yang dimaksud adalah konflik antara kelas kapitalis, kaum borjuis yang memiliki sarana-sarana produksi (majikan), dengan kelas pekerja yang ter-ekspolitas dan kaum proletariat yang tidak memiliki sarana-sarana produksi (Maran,2001:20).”

Kovensio London tanggal 13 Agustus 1814 menetapkan bahwa Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya di seberang laut yang dikuasai sejak Januari 1803 (Hanafiah,1989:72). Awal Juli 1818 Muntinghe memulai aktivitasnya di Palembang karena mengemban tugas khusus yaitu menurunkan Sultan Ahmad Najamuddin II dan setelah itu menghapus Kesultanan Palembang Darussalam (PemProv,1986:39).

Perundingan pertama dilakukan oleh Muntinghe dengan Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian dengan Ahmad Najamuddin II. Hasilnya adalah bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II diangkat kembali menjadi sultan sedangkan Ahmad Najamuddin II dinon-aktifkan dan mendapat bayaran jika menyerahkan kembali semua sarana kebesaran sultan termasuk Keraton Kuto Besak (Mahruf,1999:10). Dalam menghadapi situasi konflik dualisme pemimpin di Kesultanan Palembang Darussalam, Muntinghe tampak melakukan strategi *problem solving*. Namun situasi ini bagi Kesultanan Palembang merupakan strategi *contentious* yang menekan dan mempersempit gerak para sultan untuk menguasai

secara penuh terhadap wilayahnya sendiri. Keseluruhan daerah kerajaan Palembang dimasukkan ke dalam kekuasaan pemerintahan Belanda secara langsung sebagaimana termaktub dalam perjanjian tanggal 20 dan 24 Juni 1818. Dengan penandatanganan perjanjian tersebut merupakan vonis kematian bagi politik di Palembang (Akib,1978:47).

3. Peristiwa-Peristiwa yang terjadi Akibat Eskalasi Konflik Elit Politik di Kesultanan Palembang Darussalam Tahun 1803-1821

Dalam upaya mengukuhkan kedudukannya di wilayah Kesultanan kolonial Belanda terus melakukan perjanjian-perjanjian yang hanya memihak keuntungan bagi kolonial. Akibatnya terjadi eskalasi konflik dengan lahirnya berbagai peperangan. Tercatat peperangan antara Kesultanan Palembang dengan kolonial Belanda terjadi 3 kali yaitu perang tahun 1819 babak I (Perang Menteng), perang 1819 Babak II dan perang tahun 1821.

Menganalisis terjadinya perang antara Kesultanan Palembang dengan kolonial Belanda. Diakibatkan taktik *contentious* yang digunakan dengan cukup sukses di masa lalu oleh kolonial Belanda mengalami kegagalan karena kehilangan daya gigit. Selain itu, Belanda terlalu sering melakukan gamesmanship, mengeluarkan ancaman atau memberikan komitmen yang tidak dapat diurungkan, sementara Kesultanan Palembang Darussalam tidak lagi menganggap tindakan itu cukup dapat dipercaya atau pantas mendapatkan perhatian. Antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial Belanda semakin mengenal gerakan dan isyarat masing-masing sehingga merasa tidak

mungkin lagi mencuri kesempatan. Setiap tindakan disambut tindakan balik yang diorkestrasikan dengan tepat dan benar-benar dipelajari dengan baik (Pruitt dan Rubin, 2011:286).

D. KESIMPULAN

Konflik yang berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dari uraian mengenai konflik elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial dalam perebutan kekuasaan tahun 1803-1821 dapat disimpulkan:

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Pareto yang membagi kelompok elit politik yaitu elit politik yang memerintah (*governing elit*) dan elit non-memerintah (*non-governing elit*). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kelompok elit memerintah adalah sultan, menteri dan kelompok priyayi lainnya. Kelompok elit memerintah memiliki peran penting untuk membuat kebijakan, mengatur stabilitas ekonomi, menjaga keamanan warga di wilayah kekuasaannya dan kebijakan-kebijakan lainnya. Sedangkan elit non-memerintah dalam kajian ini adalah kolonial Inggris dan Belanda. Kelompok elit non-memerintah memiliki peran sebagai pedagang. Kemudian peran kolonial mulai menekan ekonomi kesultanan dengan memonopoli perdagangan dan kemudian mencampuri urusan dalam negeri kesultanan.

Terkait dengan konflik internal di Kesultanan Palembang Darussalam antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II merupakan konflik yang diakibatkan oleh rasa dari kekecewaan Sultan Mahmud Badaruddin II atas sikap

Sultan Ahmad Najamuddin II yang berkhianat. Selain itu, konflik ini juga distimulasi oleh kolonial sehingga konflik ini tidak berkesudahan. Sedangkan konflik eksternal antara Kesultanan Palembang Darussalam dengan kolonial merupakan konflik yang dilatarbelakangi oleh upaya mempertahankan kedaulatan dan kekayaan bagi kolonial adalah upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, keamanan dan meningkatkan kesejaterahan. Dalam konflik dengan Kesultanan, kolonial lebih banyak menggunakan strategi contentious yaitu strategi yang hanya menguntungkan kolonial.

REFERENSI

- Abdurrahman, Dudung. 2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Akib, R.H.M.1978. *Sejarah Perjuangan: Sri Sultan Mahmoed Badaroedin ke II Palembang*. Palembang: Rhama
- Amin, H.M. Ali. *Sejarah Kesultanan Palembang Darussalam dan Beberapa Aspek Hukumnya*, dalam KHO Gadjahnata, Sri dan Edi Swasono (ed). 1968. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta; UIN Press

Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, sebuah analisis konflik*, terj. Ali Manda. Jakarta. Rajawali

Daliman, A. 2012. *Metode penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak

_____. 2012. *Sejarah Indonesia: Abad XIX- Awal Abad XX*. Yogyakarta: Ombak

Duverger, Maurice. 1987. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers

_____. 2003. *Sosiologi Politik*. Terj. Daniel Dhakidea. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Hanafiah, Djohan. 1986. *Perang Palembang 1819-1821 M: Perang laut Terbesar di Nusantara*. Palembang: Pariwisata Jasa Utama

_____. 1989. *Kuto Besak; Uapaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Haji Masagung

_____. 1995. *Melayu-Jawa; Citra Budaya & Sejarah Palembang*. Jakarta: Raja Grapindo Persada

Junaidi, Heri. 2001. *Sejarah Kudeta Dalam Kebudayaan Islam: Studi Kesultanan Palembang Darussalam* dalam Laporan Penelitian, tidak diterbitkan. Palembang: Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah.

Mahruf, Kamil dkk. 1999. *Pesemah Sindang Merdika: 1821-1866*. Jakarta: Pustaka Asri

Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosologi Politik: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Renika Cipta

- Muda, Ahmad A.K. 2006. *KAMUS Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Natalis, Decki dan Pigay Bik. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- PemProv. 1986. *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud badaruddin II: Pahlawan Kemerdekaan Nasional*. Pemerintah Provinsi Daerah TK.I, Palembang
- Poerwadarminta, W.J.S. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Penjabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos
- Pruitt, Dean & G. Jeffrey. Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia,
- Varma, S. P. 1987. *Teori Politik Modren*. Jakarta: Rajawali Pers

